

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi berkembang pesat, dimana secara maksimal sudah digunakan oleh banyak orang untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari tanpa adanya batasan ruang dan waktu khususnya teknologi dalam telekomunikasi. Hal ini didukung sepenuhnya oleh jaringan telekomunikasi yang telah tersedia hingga pelosok daerah yang disebut dengan internet (Sutrisno, 2020). Internet merupakan media komunikasi dan pertukaran informasi melalui jaringan komputer yang saling terhubung diseluruh dunia (Krisianto, 2014).

Media pengantar dan fleksibilitas akses internet berubah dari waktu ke waktu, dimana sebelumnya jaringan internet hanya dapat digunakan apabila terhubung dengan kabel. Hal ini menyebabkan akses internet terbatas hanya pada dimana kabel internet tersedia. Setelah *wireless* hadir pada tahun 1985 (Prayoga, 2017) permasalahan tersebut dapat teratasi karena *wireless* menggunakan media elektromagnetik untuk memancarkan sinyal internet.

Semakin lama teknologinya juga semakin canggih yang mempengaruhi luas cakupan jaringan yang bisa diakses. Penggunaan *wireless* juga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas pengguna karena dimana pun pengguna dapat terkoneksi dengan *wireless* sehingga penyebaran dan pertukaran informasi berlangsung cepat. Instalasinya juga mudah dan cepat karena tidak membutuhkan kabel untuk terkoneksi dengan internet (Zam, 2016).

Jangkauan *wireless* yang luas memungkinkan orang mengakses internet di area *private* dan juga di area publik. Area *private* merupakan area yang memiliki akses terbatas pada sekelompok kecil orang (Parliana, 2002), biasanya pengguna dengan sengaja menyediakan *wireless* seperti di rumah-rumah. Sedangkan area publik merupakan area yang dapat diakses oleh banyak orang (Parliana, 2002), biasanya *wireless* di area publik disediakan oleh penyedia publik dengan tujuan memberikan kenyamanan kepada siapapun yang ingin mengakses internet disekitarnya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menarik pelanggannya seperti di cafe.

Pemerintah bahkan juga menyadari pentingnya, dibuktikan dengan adanya sarana internet gratis yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses internet secara merata. Perluasan ketersediaan jaringan internet juga terus dilakukan hingga ke pelosok daerah. Selain itu, makin banyak instansi pemerintah yang mulai menyediakan akses informasi tanpa batas bagi seluruh stafnya.

E-government merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi telekomunikasi di sektor pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan media teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya terbatas pada komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat tetapi juga antara pemerintah dengan pihak swasta serta pemerintah dengan pemerintah (Parsaorantua et al., 2017).

Perkembangan *e-government* didukung dengan terciptanya berbagai aplikasi untuk mengelola data-data di pemerintahan. Salah satunya yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menghadirkan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah melakukan sistem akuntansi mulai dari penyelenggaraan hingga pertanggungjawaban (Syarifuddin, 2020).

Disamping kemudahan dan keuntungan *wireless*, tersimpan berbagai kerugian dan resiko yang mengikuti. Meskipun jaringan *wireless* lebih cepat daripada media jaringannya lainnya, nyatanya semakin banyak pemakai mengakibatkan kecepatan jaringan cenderung menurun atau lemah. Selain itu kerugian yang paling menakutkan namun jarang disadari pengguna yaitu faktor keamanan. Jaringan dengan cakupan akses yang luas rentan untuk disadap atau dilakukannya kejahatan siber oleh orang asing (Utomo, 2012).

Kejahatan siber atau yang dikenal *Cyber Crime* menurut Thomas dan Loader dikutip dari Yar & Steinmetz (2019) merupakan aktivitas yang dimediasi oleh komputer yang ilegal atau dianggap ilegal oleh pihak tertentu yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Berdasarkan data The Board Report (2019), terdapat 73% perusahaan yang terkena serangan siber dalam satu tahun terakhir dengan kerugian hingga 25% dari pendapatannya. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Rekap Serangan Siber (2020), sejak 1 Januari hingga 1 April 2020 terdapat sekitar 88 juta serangan siber. Serangan ini mengganggu berbagai sistem elektronik mulai dari serangan virus, pencurian data dan informasi, hak kekayaan intelektual perusahaan, hingga gangguan akses.

Bukan hanya sektor bisnis yang menjadi target, begitu juga dengan sektor pemerintahan. Dari 48,4 juta serangan di dunia maya pada 2014, situs dengan

domain go.id yang merupakan milik pemerintah merupakan situs dengan serangan paling banyak (Kominfo, 2016). Serangan siber pada sektor pemerintahan meningkat menjadi 14% di tahun 2016 dan serangan terhadap sektor keuangan menjadi 14% di tahun 2015 (Kwarto & Angsito, 2018). Hingga tahun 2020, sektor pemerintahan masih merupakan sektor yang paling banyak mendapati serangan berupa pengaksesan atau pengungkapan data atau informasi rahasia dan sensitif tanpa izin (CISSReC, 2020).

Fenomena kejahatan ini harus disadari oleh setiap pengguna *wireless* terutama yang di *sharing* dalam suatu tempat. Penjahat siber akan memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi apapun secara ilegal demi kepentingan pribadi, kelompok atau organisasi. Kejahatan ini bukan hanya mengakses data secara ilegal saja, lebih lanjut dapat memanipulasi data, merusak data dan bahkan menghapus data. Jika bagi masyarakat umum saja sudah membahayakan, apalagi bagi instansi pemerintah. Maka untuk menghasilkan informasi yang akurat, tentu pemerintah harus melindungi data-datanya dari berbagai risiko kejahatan.

Diantara berbagai instansi pemerintah, yang memegang peranan cukup penting di daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar yaitu Badan Keuangan Daerah. BKD memiliki tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BKD sudah melibatkan teknologi informasi bahkan pelaporan secara online, yang mengkhawatirkan adalah internet atau penggunaan jaringan komunikasi di instansi ini menggunakan *wireless sharing*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka skripsi ini bermaksud untuk mengkaji dan mengeksplorasi bagaimana *wireless* digunakan dalam melakukan pengelolaan data keuangan di instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan *wireless* dalam pengelolaan data keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru di bidang pengelolaan data keuangan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait penggunaan *wireless* dalam pengelolaan data keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengambil Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan *wireless* dalam pengelolaan data keuangan.
- b. Bagi User, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran user dalam mengelola data keuangan menggunakan *wireless*.
- c. Bagi teknisi jaringan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membangun infrastruktur jaringan serta usaha pengamanan jaringan.

1.5. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul penelitian ini serta rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori yang terkait dengan penelitian, kerangka penelitian, serta pengembangan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, objek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang didapat.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari peneliti.

